

#### D. LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai :

a. Perberdayaan perempuan wirausaha perempuan

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

c. Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia

d. Produk hukum daerah lainnya terkait perempuan

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak

2. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai :

a. Perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

b. pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak

c. Produk hukum daerah lainnya terkait anak

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

3. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk :

a. perempuan

Ada  Tidak Ada

b. anak

Ada  Tidak Ada

4. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi

a. Pelayanann pengaduan

Ada  Tidak Ada

b. Konsultasi

Ada  Tidak Ada

c. Mediasi

Ada  Tidak Ada

d. Penjangkauan

Ada  Tidak Ada

e. Kesehatan

Ada  Tidak Ada

f. Rehabilitasi sosial

Ada  Tidak Ada

g. Bimbingan rohani

Ada  Tidak Ada

h. Pendampingan

Ada  Tidak Ada

i. Penegakan dan bantuan hukum

Ada  Tidak Ada

j. Layanan pemulangan

Ada  Tidak Ada

k. Reintegrasi sosial

Ada  Tidak Ada

\*)beri tanda X pada kotak pilihan

5. Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi:

a. Tenaga konsultasi

Ada  Tidak Ada

b. kesehatan

Ada  Tidak Ada

c. rehabilitasi sosial

Ada  Tidak Ada

d. bimbingan sosial

Ada  Tidak Ada

e. bantuan dan penegakkan hukum

Ada  Tidak Ada

f. penjangkauan dan layanan pemulangan

Ada  Tidak Ada

g. reintegrasi sosial

Ada  Tidak Ada

\*)beri tanda X pada kotak pilihan

6. Tersedianya program pencegahan pekerja anak :

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

*Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan*

7. Tersedianya program pencegahan perkawinan anak :

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

*Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan*

- Bimbingan perkawinan usia sekolah (Kantor Kemenag Kabupaten Karanganyar)
- Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait batas usia nikah minimal 19 tahun bagi pria dan wanita melalui penyuluh PNS dan suscatin pranikah

8. Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak :

Ada  Tidak Ada

\*) beri tanda X pada kotak pilihan

9. Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA
- Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA 39
  - Jumlah pengaduan / laporan yang masuk di UPT PPA 39
10. Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat
- Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA 8
  - Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA 8
11. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA
- Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA 2
  - Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA 2
12. Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan 0
13. Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan 4

Demikian data capaian di bidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Karanganyar, 3 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)  
Kabupaten Karanganyar



Drs. AGAM BINTORO, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650601 199203 1 007